**POLITIEK DALAM NEGERI**

Interpelasi K.N.I. poesat dengan Menteri dalam Negeri

Djokja, 13 Des. (Antara):

MENJAMBOENG berita tentang interpelasi Badan Pekerdja K.N. Poesat dgn. Menteri Dalam Negeri Mr. Moh. Roem pada tg. 7 Des. 1946 dapat dikabarkan lebih landjoet, bahwa tanja djawab pada hari itoe ialah mengenai Daerah Istimewa Solo dan Jogja, Pemerintah Daerah loear Djawa dan Soematera dan jang mengenai corps Pamong-Pradja, dari pihak Badan Pekerdja dimadjoekan pertanjaan2 sbb:

Daerah istimewa Solo-Djokja.

SAMPAI kemana oesaha Kementerian Dalam Negeri dalam hal mengatoer Daerah Istimewa Solo dan Djokja?

1. Oesaha mengadakan kesatoean Pemerintah di Solo.
2. Kedoedoekan radja2 di Solo.
3. Pengangkatan dan pembagian tenaga pegawai dalam kedoea keradjaan didalam Pemerintahan kesatoean sekarang (ada kabar bahwa ada seorang wedana jang pro pro monarchie diangkat mendjadi Patih sehingga menimboelkan soeasana tidak baik dll.)
4. Meletakkan peratoeran2 tentang kedoedoekan kedoea daerah ini dalam oendang2, sehingga memberi kepastian kepada semoea fihak,

Pemerintah loear Djawa dan Soematera,

SOAL pemerintah daerah loear Djawa dan Soematera, ialah menjamboeng soal tanja-djawab dengan Goebernoer2 Maloekoe dan Kalimantan dengan perantaraan Kementerian Dalam Negeri pada sidang ke-IV tg. 29-4-’46 tentang oesaha dan pekerdjaan Goebernoer (pada waktoe itoe jang datang hanja Goebernoer maloekoe: Goebernoer Kalimantan hingga doea kali tidak datang)

Dari djawaban atas pertandjaan itoe ternjata pekerdjaan mereka sedikit sekali mengenal daerah2 mereka, melainkan hanja mengenal warga negara jang berasal dari daerah itoe jg. ada di Djawa.

1. Berhoeboeng dengan ini bagaimana sikap Kementerian Dalam Negeri terhadap adanja Goebernoer ini?
2. Apa memang perloe diadakan Goebernoer oentoek daerah loear Djawa dan Soematera? kalau memang perloe mengapa oentoek Soclawesi dan Soenda Ketjil tidak diangkat pengganti atau Wakil Goebernoer di Djawa ini? Kalau tidak perloe apakah tidak dapat dengan tjara lain mengoeroes kepentingan mereka jang berasal dari daerah loear Djawa dan Soematera.
3. Bagaimana perhoeboengan Goebernoer dengan organisasi2 jg. mengenai daerah itoe dan bagaimana soesoenan seorang Goebernoer itoe dan anggaran belandja berapa dan oentoek apa?

Ini berhoeboeng dengan soeara dari Parpim jang minta soepaja diadakan pemerintah colegiaal.

Corps Pamong-Pradja.

BAGAIMANA sikap Kementerian Dalam Negeri terhadap corps Pamong-Pradja; Apakah Kementerian menghendaki adanja corps itoe? Kalau tidak, dalam pada itoe oentoek sementara bagaimana politik mengangkat kepala2 daerah (Patih, Boepati, Wakil Residen, Residen, dan Goebernoer).

Minta soepaja djawaban atas pertanjaan ini disertai dengan daftar pengangkatan pegawai2 Itoe.

Djawaban Menteri D.N

MENDJAWAB pertanjaan pertama Mr. Roem menerangkan bahwa sesoedah proklamasi kemerdekaan, pada hakekatnja kita mereboet kekoeasaan dari pemerintah militer Djepang. Pada waktoe itoe radja2 di Solo dan Jogja dengan tegas menjatakan berdiri dibelakang Presiden.

Ini mendjadi salah satoe sokongan moreel bagi Pemerintah Repoeblik. Selandjoetnja Pemerintah telah berichtiar dengan berpedoman kepada satoe djalan jang sebaik2nja oentoek mengerahkan perhoeboengan radja2 dgn, rakjat dalam melaksanakan pemerintah jang tegoeh.

Ketika di Solo diadakan Pemerintah Sementara jang meroepakan bentoek keresidenan, waktoe itoe Pemerintah mengganti 6 boepati dan 6 patih ketjoeali disoeatoe tempat didaerah tsb. Pemerintah ini soedah sesoeai dengan oendang2 dasar meskipoen hanja bersifat sementara hingga atas kebidjaksanaan Pemerintah di Solo tidak ada pertikaian politik.

Pemerintah telah memegang tegoeh pasal 18 dari oendang2 dasar Negara kita. Maksoed Pemerintah jang mengenai kedoea daerah istimewa itoe ialah mengadakan kesatoean pemerintahan jang dimokratis seperti jang terdapat dilain2 daerah. Kedoedoekan radja2 di Solo oentoek sementara seperti sekarang menoenggoe peratoeran pasti.

Tentang oendang2 pokok jang mengenai daerah istimewa Jogja sesoedah direntjanakan oleh Kementerian Dalam Negeri dan sesoedah didengar pendapat Dewan Perwakilan daerah Jogja rentjana itoe kemoedian akan dimadjoekan kepada Badan Pekerdja K.N. Poesat. Begitoe djoega jang mengenai daerah Solo pemerintah akan menjempoernakan dengan segala peratoeran jang masih terasa koerang baik dan nanti akan dimadjoekan poela kepada Badan Pekerdja K. N. Poesat.

Sesoedah Menteri Dalam Negeri mendjawab pertanjaan2 Badan Pekerdja jang dimadjoekan oleh anggota Soebadio, kemoedian rapat mendapat kesempatan oentoek menjatakan pendapatnja terhadap djawaban pemerintah.

Anggota Mr. Sartono dengan pandjang lebar membitjarakan soal daerah istimewa, teroetama daerah istimewa Solo. Antara lain2 dikemoekakan soal anggaran daerah istimewa Solo dan Civiele lijst. Pembitjara minta sikap jang tegas terhadap daerah2 istimewa apakah akan dipertahan teroes atau dihapoeskan?

Anggota Sjamsoedin St. Maknoer berpendapat bahwa dari keterangan Pemerintah ia dapat menjelami loeboek hati Pemerintah bahwa hakekatnja daerah istimewa lambat laoen akan didjadikan keresidenan biasa sadja Pembitjara bertanja mengapa oendang2 pokok bagi daerah istimewa Jogja lebih doeloe haroes dimadjoekan kepada Badan Perwakilan Jogja dan kemoedian kepada Badan Pekerdja K.N. Poesat? Jang dikoeatirkan ialah bahwa Badan Perwakilan Daerah menerima tetapi Badan Pekerdja K.N. Poesat menolak. Bagaimana sikap Pemerintah kalau terdjadi demikian?

Mendjawab pendapat2 anggota2 tsb. tentang daerah istimewa, Menteri Dalam Negeri menerangkan bahwa karena pasal 18 Oendang2 Dasar beloem dihapoeskan maka pemerintah masih merasa wadjib mengadakan daerah istimewa. Tentang anggaran belandja dan civiele lijst jang dikemoekakan oleh anggota Sartono, Menteri mendjawab bahwa hakekatnja soal2 itoe tidak lagi termasoek dalam kekoeasaan Badan Perwakilan Daerah melainkan termasoek rentjana Pemerintah Poesat dan dipoetoeskan bersama2 Badan Pekerdja. Tentang pendapat anggota St, Makmoer jang meraba2 si hati pemerintah berkenaan dengan penghapoesan daerah istimewa, Menteri mendjawab, bahwa pendirian Pemerintah terhadap soal itoe sama sadja seperti jang diterangkan dalam djawaban kepada anggota Sartono. Jang mengenai soal memadjoekan oendang2 pokok daerah istimewa Jogja lebih doeloe kepada Dewan Perwakilan Daerah Jogjá, Menteri menerangkan bahwa hal itoe informeel sadja dan kepoetoesan jg. terachir ada pada persetoedjoean Badan Pekerdja K.N. Poesat dan Pemerintah.

Soal Seberang.

JANG mengenai Pemerintahan daerah loear Djawa dan Soematera Menteri Moh. Roem menerangkan, bahwa sesoedah proklamasi kemerdekaan Pemerintah Poesat mengangkat Mr. I. Goesti Ketoet Poedja mendjadi Goebernoer Soenda Ketjil, Dr. Ratoelangi mendjadi Goebernoer Soelawesi Goesti Moh. Noer mendjadi Goebernoer Kalimantan, Mr. Latuharhary mendjadi Goebernoer Maloekoe dsbnja. Oesaha Pemerintah sekarang ini ialah meneroeskan apa jang soedah ditetapkan doeloe. Misalnja hal ini dihilangkan tentoe rakjat akan gelisah. Djadi permintaan Parpim (Partai Politik Indonesia Maloekoe) oentoek mengadakan Pemerintahan collegiaal tak dapat diloeloeskan.

Kemoedian anggota Manai Sophian membitjarakan soal kontisariaat dan wakil Goebernoer bagi Soelawesi dan minta soepaja pemerintah dengan segera mengambil kepoetoesan dalam soal ini.

Mr. Maramis mengoesoelkan. soepaja Kementerian Dalam Negeri mengangkat seorang wakil Goebernoer Soelawesi, atau seorang kommisaris jang dianggap pantas dan tjakap.

Mendjawab pertanjaan anggota Gozali, Menteri Dalam Negeri menerangkan bahwa ketika diangkat mendjadi Goebernoer Kalimantan Goesti Moh. Noer berhoeboeng dengan keadaan tak dapat kembali ke Kalimantan.

(Samboengan lihat pag. II).